

## BAB VI

# SIKAP DAN PANDANGAN BERBAGAI KALANGAN TERHADAP RANCANGAN PESANTREN BURUH PABRIK

### A. Sikap dan Pandangan Buruh Pabrik

Sikap dan pandangan pekerja terhadap rancangan pesantren buruh pabrik ini sangat diperlukan, mengingat mereka merupakan salah satu komponen penting yang ada dalam pesantren tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa pesantren buruh pabrik dapat diartikan sebagai tempat berlangsungnya proses pembelajaran Islami yang santrinya terdiri dari buruh pabrik. Pesantren jenis ini berangkat dari proses evolusi yang panjang akibat pergeseran nilai yang berkembang di tengah lingkungan industri.

Pada awal berdirinya, “embrio” pesantren buruh pabrik memang dirancang sedemikian rupa untuk keperluan pendidikan agama bagi santri murni. Proses pembelajaran yang berlangsung di pesantren ini pada awalnya berjalan secara konvensional, dalam arti memenuhi elemen dasar untuk disebut sebagai pesantren konvensional. Namun dalam proses selanjutnya, pesantren ini mengalami perubahan yang perlahan seiring dengan perubahan zaman. Perubahan pesantren konvensional menuju pesantren industri ini diakibatkan rendahnya tingkat resistensi yang dimiliki oleh pesantren tersebut dalam menghadapi derasnyanya arus perubahan yang terjadi, khususnya perkembangan industri modern.

Adapun terkait dengan gambaran dan bentuk pesantren buruh pabrik masa depan, setidaknya ada beberapa komponen yang perlu dimintakan pendapat kepada buruh, pengelola pabrik, ormas Islam, dan pakar pendidikan, yakni tentang fasilitas, kurikulum, metode, dan waktu yang berhubungan dengan proses pembelajaran, pimpinan pesantren serta lokasi pesantren industri itu sendiri, sehingga tercipta sebuah konstruk model pesantren industri yang ideal.

Karyawan buruh pabrik yang dimintai pandangan mengenai rancangan pesantren industri ini, meliputi karyawan yang tinggal di luar pondok pesantren (kos-kosan). Ketika mereka ditanya tentang kemungkinan hadirnya pesantren industri ini, diperoleh data bahwa baik karyawan buruh pabrik yang tinggal di pesantren maupun yang berada di luar pesantren ternyata tidak ada perbedaan yang signifikan, yakni dari 200 responden sebanyak 182 orang (91%) menyatakan setuju berdirinya pesantren industri, yang seluruh santrinya adalah karyawan buruh pabrik, dan hanya 18 orang saja yang menyatakan kurang setuju.

Di antara 200 responden tersebut, salah seorang karyawan (Budi Utomo) yang menyatakan setuju mengatakan bahwa:

“Jika ide pesantren industri ini benar-benar terwujud dan menjadi kenyataan, maka akan sangat membantu teman-teman karyawan buruh, khususnya yang beragama Islam untuk melaksanakan ibadah, misalnya shalat lima waktu. Di samping itu sesekali waktu pimpinan pabrik mengusahakan pembinaan mental spriritual dengan mendatangkan ustadz atau penceramah dari luar, dengan begitu kita bisa menambah ilmu agama dan kehidupan keagamaan kita dapat terpelihara bahkan bisa ditingkatkan.”<sup>1</sup>

Adapun bagi mereka yang kurang setuju, mereka merasa khawatir apabila keberadaan pesantren ini justru akan mengganggu aktivitas kerja di pabrik dan tersitanya waktu istirahat

<sup>1</sup> Wawancara tanggal 27 April 2002

akibat banyaknya aktivitas keagamaan di pesantren. Kekhawatiran ini dapat dimaklumi mengingat mereka masih berasumsi bahwa keberadaan pesantren industri ini tiak ada bedanya dengan pesantren konvensional pada umumnya. Yang demikian ini dapat dilihat dari penuturan Bambang Edi (bukan nama sebenarnya):

“Saya dan teman-teman lainnya tidak menetap di pondok pesantren dan lebih suka memilih di kos-kosan, karena kos-kosan lebih bebas, tidak terikat segala macam peraturan dan tidak terganggu oleh kegiatan-kegiatan lain serta dapat beristirahat dengan tenang sehingga bisa bekerja lebih fresh dan tidak terlalu capek.”<sup>2</sup>

## 1. Keadaan Santri

### a. Usia Santri

Dalam kaitannya dengan usia minimal santri yang diperbolehkan menempati pesantren industri ini, diperoleh data bahwa mayoritas responden menghendaki minimal berusia 15 tahun. Secara rinci bisa diketahui sebagai berikut; dari 200 responden yang dimintai pendapat tentang usia minimal tersebut diperoleh keterangan : 106 orang atau 53% menyatakan 15 tahun, 54 orang atau 27% menjawab 17 tahun, sedangkan sisanya 18 orang atau 9% menghendaki usia minimal yang menempati pesantren industri ini adalah usia 20 tahun.

Selanjutnya, terkait dengan batas maksimal santri yang bertempat tinggal di pesantren industri tersebut, rata-rata tidak menghendaki adanya pembatasan usia, dari 200 responden yang dimintai keterangan, 97 orang atau 48,5% menjawab sebaiknya tidak ada batasan usia. Alasan mereka menyatakan demikian ini, karena pada prinsipnya agama tidak membatasi seseorang untuk menuntut ilmu, bahkan dalam sebuah hadits dikatakan bahwa *tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat (kubur)*.

---

<sup>2</sup> Wawancara tanggal 27 April 2002

Hanya 26 orang atau 13% saja yang membatasi sampai usia 30 tahun. Hal ini mengingat usia-usia seperti itu adalah usia di mana seseorang sudah saatnya memasuki dunia rumah tangga, sehingga akan mengurangi ke-*ajeg*-an (istiqamah), karena itu jika mereka tetap diperbolehkan di pondok dikhawatirkan bisa mengganggu konsentrasi yang lain dalam belajar. Sementara yang lain yakni 77 orang atau 38,5% menyatakan bahwa boleh tidaknya para santri bertempat tinggal itu ukurannya bukan usia, melainkan dibatasi dengan perkawinan, dalam arti jika mereka telah menikah maka tidak lagi diperkenankan di pondok. Karena kesibukan orang yang sudah berumah tangga dengan yang belum sangat berbeda.

#### b. Jenis Santri

Pada umumnya, sebagaimana yang terjadi pada pesantren konvensional, tidak ada klasifikasi mengenai jenis santri, baik yang belajar di lembaga pendidikan formal atau nonformal, bahkan santri pekerja sekalipun asalkan bisa mengikuti kegiatan dan segala aturan yang berlaku di pesantren, mereka bisa diterima dan boleh menjadi santri. Dalam kaitannya dengan jenis santri yang akan mondok di pesantren industri ini, terdapat dua kategori, yakni *pertama*, menghendaki santri khusus yang berstatus sebagai pekerja (karyawan), sedang yang bukan karyawan tidak patut bertempat tinggal di pesantren industri. Mereka yang menyatakan demikian sebanyak 90 orang (45%) dari 200 responden. Alasannya adalah karena sejak semula munculnya gagasan tentang pesantren industri ini memang bertujuan untuk meringankan beban para buruh pabrik, selain untuk meningkatkan ketahanan mental spiritual buruh itu sendiri. Atas dasar ini, maka jangan sampai ada seorang karyawan yang tidak tertampung di pesantren industri, disebabkan banyaknya minat para santri selain karyawan yang ingin mondok di pesantren industri tersebut. Sedang sebanyak 110 orang (55%) menyatakan tidak setuju jika santri yang boleh bertempat tinggal di pesantren industri itu, khusus bagi mereka

yang berstatus sebagai pekerja (karyawan). Karena sebagaimana pesantren pada umumnya, pesantren industri juga tidak bisa melepaskan diri dengan tidak melibatkan masyarakat sekitar pondok. Oleh sebab itu, telah menjadi keniscayaan bagi pesantren untuk menerima santri dari berbagai jenis dan karakter di mana pesantren itu berada.

### c. Lama Santri Menetap di Pesantren

Dari 200 responden yang dimintai keterangan tentang perlu tidaknya batasan waktu belajar di pesantren ini, sebanyak 144 orang (72%) menyatakan perlunya pembatasan, meskipun jenjang waktu yang diinginkan berbeda-beda. Data di lapangan menunjukkan bahwa 30 orang (15%) menentukan maksimal belajar di pesantren 2 tahun, sebanyak 65 orang (32,5%) membatasi maksimal 4 tahun, sedang 49 orang (24,5%) menghendaki maksimal 5 tahun. Adapun selebihnya, yakni 56 orang (28%) menyatakan tidak perlu pembatasan waktu belajar.

Bagi mereka yang menyatakan setuju adanya pembatasan waktu belajar tersebut, mereka beralasan bahwa beberapa kemudahan, baik yang berkaitan dengan tersedianya fasilitas maupun berbagai aktivitas keagamaan yang diberikan pihak pesantren industri kepada karyawan buruh itu, harus bisa dinikmati oleh seluruh karyawan yang berkeinginan untuk mondok di pesantren tersebut tanpa pandang bulu dengan mengedepankan aspek kebersamaan dan pemerataan. Hal ini sangat mungkin terjadi, manakala diatur secara bergantian (giliran) dengan pembatasan waktu belajar, berpegangan pada prinsip belajar seumur hidup dan tidak mengenal adanya pembatasan usia.

## 2. Lokasi dan Jarak Pesantren dengan Daerah Industri

Terkait dengan lokasi di mana pesantren industri ini harus berada, apakah sebaiknya berada di dalam areal perindustrian

atau agak jauh dari tempat kerja, tapi lebih dekat dengan perkampungan penduduk. Dalam hal ini diperoleh data bahwa dari 200 responden yang ada, 114 (57%) menghendaki pesantren industri tersebut dibangun dalam areal perindustrian. Yang demikian itu karena di samping bisa menghemat biaya transportasi, juga tidak tergesa-gesa (tergopoh-gopoh) datang ke tempat kerja, jika dibandingkan dengan lokasi yang jauh dari tempat kerja. Hal ini mengingat adanya kesibukan lain berupa berbagai macam aktivitas keagamaan yang wajib diikuti di pesantren industri tersebut.

Sedangkan sisanya, yakni 86 orang (43 %) menyatakan lebih senang, jika berdirinya pesantren itu berada di lokasi yang agak jauh dari tempat kerja dan lebih dekat dengan perkampungan penduduk setempat. Dengan pertimbangan bahwa keberadaan sebuah pesantren industri pada mulanya adalah mengemban misi dakwah dan meningkatkan pembinaan mental spiritual para karyawan buruh itu sendiri. Jika hal ini terjadi di dalam area industri, maka akan mengandung konsekuensi; akan terganggu dengan berbagai aktivitas kerja di pabrik dan jika tidak hati-hati, maka berakibat fatal, yakni program pendidikan dan pembinaan yang direncanakan oleh pihak pesantren tidak akan berhasil, disebabkan kurang adanya konsentrasi baik dari pihak pengelola maupun para santri itu sendiri.

Selanjutnya, terkait dengan jarak jauhnya dengan lokasi areal industri, mayoritas menghendaki tidak lebih dari 5 km, dengan pertimbangan untuk menghemat biaya transportasi dan tidak terlalu mengganggu aktivitas kerja pabrik.

### **3. Fasilitas: Sarana dan Prasarana Pesantren Industri**

Sebagaimana diketahui bahwa sebuah institusi pendidikan Islam layak dan patut disebut dengan pesantren manakala mempunyai lima elemen dasar; kiai, santri, kitab kuning, pe-

mondokan, dan masjid atau mushalla. Dalam kaitannya dengan pesantren industri ini, ternyata kehadiran masjid ini masih dianggap relevan dan menjadi pusat kegiatan pembelajaran. Data di lapangan menunjukkan bahwa 200 responden, 145 orang (75,5%) menghendaki adanya masjid di pesantren industri. Sedangkan 55 orang saja (27,5%) yang menyatakan kehadiran masjid bukanlah suatu keharusan, karena segala aktivitas pembelajaran dan ibadah bisa dilakukan di suatu tempat yang bukan dalam bentuk masjid (aula).

Dalam kaitannya dengan keberadaan masjid ini, salah seorang buruh pabrik bernama Eko Susilo menyatakan bahwa:

“Seperti yang terjadi saat ini, saya dan teman-teman merasa kesulitan dalam melaksanakan shalat fardlu. Meskipun sudah disediakan tempat shalat tapi sangat sempit dan berjubel, sehingga kita semua harus antrian menunggu, sementara waktu istirahat sangat singkat. Kadang-kadang belum sempat shalat waktu istirahat sudah habis. Jadi, andaikata di pabrik kami ini ada masjidnya, tentu hal yang demikian ini tidak akan terjadi.”<sup>3</sup>

Dengan demikian, kita bisa memperoleh pemahaman bahwa pada tingkat tertentu, ternyata kaum buruh juga sangat membutuhkan proses pembinaan agama (di antaranya bisa melaksanakan shalat lima waktu dengan khusyu'). Tapi pada perkembangan selanjutnya bisa saja terjadi bahwa masjid tidak hanya sebagai sebuah tempat shalat semata, tetapi juga sebagai tempat pembinaan mental lainnya.

Fasilitas lain yang harus ada di pesantren industri menurut karyawan buruh, terdiri dari: kondisi kamar yang memadai, ruang belajar mengajar yang nyaman dan mereka juga menuntut adanya fasilitas penunjang yang lain, seperti poliklinik, sarana informasi, telekomunikasi, kantin, dan lain sebagainya. Di antara ketiga jenis

---

<sup>3</sup> Wawancara tanggal 3 Mei 2002

fasilitas tersebut, mayoritas buruh pabrik yakni 79 orang (39,5%) menginginkan tersedianya kamar tempat istirahat yang memadai dan layak. Sedang 75 orang (37,5%) menghendaki adanya ruang belajar yang nyaman dan 46 orang (23%) menuntut adanya fasilitas penunjang sebagaimana tersebut di atas.

Selain itu, perlu juga diperhatikan bahwa mereka yang menghendaki kantin yang menyediakan kebutuhan makan sehari-hari yang harganya lebih murah jika dibanding dengan makanan yang dijual di warung-warung pada umumnya. Adapun harga sekali makan yang dikehendaki berkisar Rp1.500,00-Rp2.000,00.

Dari data tersebut, kiranya bisa dipahami bahwa para karyawan buruh mendambakan kenyamanan dan membutuhkan istirahat yang cukup untuk melepas lelah dan kepenatan setelah disibukkan dengan kegiatan sehari-hari di pabrik. Di samping itu, mereka sebenarnya juga berusaha mendapatkan bimbingan pengetahuan melalui pesantren buruh pabrik dengan kegiatan belajar mengajar yang diberikan di pesantren tersebut. Kondisi demikian bisa dibuktikan dengan jawaban dan tanggapan mereka yang masih menginginkan ruang belajar mengajar yang kondusif dan dirancang khusus bagi karyawan buruh pabrik. Menyadari akan keberadaannya sebagai karyawan buruh, yang notabene selalu terikat dengan segala macam aturan dan aktivitas mereka di pabrik, maka kehadiran pesantren industri ini dituntut untuk bisa menyediakan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya, seperti; pelayanan kesehatan, informasi baik cetak maupun elektronik (televisi, tape recorder), wartel, dan sebagainya. Semua ini untuk mengejar ketertinggalan mereka yang terkait dengan informasi dan perkembangan masalah-masalah kekinian.

Dalam hal ini, seorang karyawan buruh yang bernama Pangestu, ketika ditanya tentang fasilitas-fasilitas tersebut dia mengatakan:



“Sebenarnya bagi saya dan InsyaAllah teman-teman lainnya juga menginginkan bagaimana dengan munculnya pesantren industri ini nanti bisa membantu menyediakan fasilitas dan sarana prasarana yang bagus dan murah, seperti kamar yang bersih serta fasilitas-fasilitas lain yang bisa digunakan untuk kegiatan keagamaan sehingga bisa menambah ilmu dan pengetahuan, di samping bekerja mendapatkan rizqi.”

Selanjutnya, ketika para buruh dimintai keterangan untuk memilih ukuran kamar yang ideal, kebanyakan mereka, yakni 131 orang (65,5%) menghendaki kamar yang berukuran 3x4 m. Sedangkan yang memilih ukuran 3x3 m sebanyak 69 orang (34,5%). Dari ukuran kamar tersebut rata-rata mereka menghendaki untuk diisi empat orang saja dan juga dilengkapi dengan fasilitas tempat tidur yang layak, ventilasi yang cukup, dan tersedianya lemari pakaian. Yang demikian itu bisa dimaklumi, karena bagi mereka bayangan tentang pesantren industri adalah suatu pesantren yang dirancang khusus untuk karyawan buruh yang sudah letih dan sibuk dengan kegiatan-kegiatan di pabrik. Harapan mereka selanjutnya adalah ingin memanfaatkan kehadiran pesantren tersebut dengan sebaik-baiknya.

Di samping sarana dan prasarana di atas, para buruh juga mengharapkan tersedianya kantin (warung) khusus yang dikelola oleh pondok. Kantin ini menyediakan berbagai macam makanan baik kecil (ringan) maupun lainnya dengan harga yang relatif lebih murah dibanding dengan kantin yang berada di luar pondok, asalkan pihak pengelola tidak sampai rugi. Keberadaan kantin ini dimaksudkan, di satu sisi bisa menjadi sumber dana pesantren dan di pihak lain cukup membantu bagi kemudahan para santri untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Selain kantin tersebut, para buruh juga mendambakan adanya toko (kios) yang dikelola pondok semacam koperasi, yang menyediakan kebutuhan sehari-hari, seperti sabun, sikat gigi, handuk, shampoo dan lain sebagainya.

Semua fasilitas sebagaimana yang telah dikehendaki dalam kaitannya dengan pesantren industri di atas, merupakan ke-

lengkapan sarana pendukung kegiatan yang berlangsung di pesantren tersebut. Adapun tentang jumlah kuantitatif sarana dan prasarana yang harus tersedia, sangat tergantung oleh besar kecilnya jumlah santri. Bagi pesantren yang memiliki jumlah santri besar, hampir bisa dipastikan fasilitas yang ada harus seimbang dengan besarnya jumlah tersebut.

Perlengkapan sarana lainnya seperti mesin ketik, komputer, ruang perpustakaan, dan perlengkapan sejenis tampaknya tidak terlalu mereka harapkan. Dari 200 responden yang dimintai keterangan diperoleh data; hanya 58 orang, yakni 29% saja yang menghendaki adanya peralatan-peralatan tersebut, sedangkan sisanya sebanyak 142 orang atau 71% menyatakan tidak terlalu peduli tentang ada atau tidaknya alat kelengkapan semacam komputer atau sejenisnya. Hal ini, jika dikaitkan dengan keinginan mereka semula bahwa kehadiran pesantren industri ini diharapkan bisa membantu dan mendukung mereka untuk kelancaran kegiatan-kegiatan di pabrik, maka kelengkapan sarana seperti komputer, perpustakaan dan lain sebagainya dirasa malah menambah beban kesibukan yang mereka lakukan sehari-hari. Yang demikian itu bisa dimaklumi, karena mereka masih belum tahu dan juga belum bisa memanfaatkan peralatan tadi serta mungkin tidak ada kaitan langsung dengan kegiatan mereka di pabrik. Selama mereka bekerja di pabrik, tidak ada kegiatan yang menggunakan peralatan elektronik tersebut, yang ada hanyalah pekerjaan kasar yang mengandalkan kekuatan fisik semata. Namun, jika mereka sudah mengenal dan bisa menggunakannya, maka akan menerima dan termotivasi untuk mempelajarinya dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik dengan bermodalkan keterampilan yang telah mereka peroleh di pesantren melalui peralatan tadi.

Hal ini terbukti, ketika mereka ditanya tentang keterampilan apa yang diminati dan diinginkan selama berada di pesantren industri ini, rata-rata mereka menjawab keterampilan menjahit,

yakni 82 orang (41%), tata boga 60 orang (30%) dan komputer hanya 58 orang (29%). Dengan demikian, bisa dipahami bahwa sebenarnya mereka masih menginginkan kesibukan lain yang ada kaitannya dengan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan selama bisa dilakukan dan tidak mengganggu aktivitas mereka sebagai buruh. Oleh sebab itu, kehadiran pesantren industri ini sangat mereka dambakan, di samping menyediakan tempat hunian yang layak dan tempat istirahat yang nyaman juga sebagai tempat untuk menambah pengetahuan (agama-umum) dan keterampilan.

#### **4. Elemen Kepemimpinan Pesantren: Kiai atau Ustadz**

Keberadaan kiai/ustadz di dunia pesantren termasuk pula pesantren industri ini masih sangat dominan, dalam arti sebuah lembaga tak patut disebut pesantren, tanpa adanya kiai/ustadz. Bahkan diyakini, semua aktivitas di pesantren tak bisa berjalan dengan baik, manakala tidak didukung oleh kiai/ustadz. Hal ini terbukti bahwa ketika karyawan buruh ini ditanya tentang siapakah seharusnya yang patut memimpin pesantren industri ini, yakni kiai/ustadz atau orang biasa, maka diperoleh data, 146 orang (73%) menjawab harus dipimpin oleh kiai/ustadz, dan hanya 54 orang (27%) saja yang menghendaki dipimpin orang biasa yang punya komitmen terhadap pengembangan pendidikan melalui pesantren. Yang demikian ini dimaklumi, karena kehadiran kiai/ustadz ini sangat dibutuhkan dan dimaklumi sebagai salah satu faktor yang paling dominan bagi berlangsungnya kegiatan keagamaan di pesantren, tanpa kiai diyakini semua kegiatan yang ada tak mungkin bisa berjalan dengan baik dan sesuai rencana.

Adapun kriteria kiai yang mereka idolakan dalam memimpin pesantren industri ini adalah harus seorang sarjana baik S-1, S-2, maupun S-3. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa dari 200 responden, sebanyak 101 (50,5%) menyatakan demikian. Sedangkan 99 orang (49,5%) menjawab tidak harus sarjana, tapi minimal

harus pernah menghabiskan waktunya mondok di pesantren konvensional. Latar pendidikan yang dimiliki oleh kiai, setidaknya, bisa memberikan bekal yang cukup dalam hal memberikan wawasan kepada para santri, di samping memberikan ketrampilan-ketrampilan lainnya guna meningkatkan sumber daya manusia santrinya. Meskipun demikian, para kiai tampaknya cenderung untuk mengajarkan kitab kuning yang sudah pernah dipelajari ketika mereka mondok. Hal ini bisa dipahami dalam konteks transmisi keilmuan di pesantren oleh seorang kiai kepada santri. Adanya transmisi keilmuan harus didahului dengan “syahadah/ijazah”, yakni santri memperoleh izin dari gurunya untuk mengajarkan suatu kitab/ilmu kepada orang lain. Hal inilah, sebagaimana yang terjadi di pondok konvensional, yang menyebabkan kiai pesantren buruh pabrik cenderung mengajarkan apa-apa yang sudah pernah diajarkan dan diizinkan oleh gurunya saja.

## **5. Kurikulum Pesantren Industri dan Alokasi Waktu Pembelajaran**

Dalam kaitannya dengan kurikulum pesantren industri ini, setidaknya bisa dikategorikan menjadi tiga kelompok: *Pertama*; ilmu keagamaan murni, dalam arti tidak diajarkan ilmu-ilmu umum seperti ekonomi, matematika, hukum, dan lain-lain. *Kedua*; gabungan antara agama dan umum tadi. *Ketiga*; agama dan ketrampilan praktis. Setelah dimintai tanggapannya tentang ketiga kategori ilmu tersebut, pada umumnya para buruh menghendaki terealisasinya program pembinaan mental spiritual dengan memberikan materi-materi keagamaan (fiqh, akhlak, dan tasawuf atau ketauhidan) dan keterampilan (menjahit, tata boga, dan komputer), yakni dari 200 responden terdapat 110 (55%) memilih kelompok ketiga, yaitu agama dan keterampilan. Sedang 25 orang (12,5%) menghendaki ilmu agama murni, dan 65 (32,5%) masih menginginkan perpaduan antara ilmu agama dan umum. Dengan demikian, bisa dipahami bahwa kehadiran pesantren industri ini,

di samping diharapkan mampu memberikan motivasi bagi peningkatan mental spiritual karyawan buruh, juga bisa memberikan bekal keterampilan demi menopang karier yang sedang mereka tekuni dan juga untuk memperbaiki serta mempersiapkan hari esok yang lebih baik dari yang mereka lakukan saat ini.

Selanjutnya, terkait dengan materi ilmu agama tersebut, masihkah perlu diajarkan dalam bentuk kajian kitab kuning sebagaimana yang terdapat pada pesantren konvensional. Dari 200 responden yang dimintai keterangan, 150 (75%) masih menganggap perlu, dengan pertimbangan bahwa salah satu ciri khas sebuah pesantren adalah adanya pengajaran kitab kuning. Sedangkan lainnya, yakni sebanyak 50 orang (25%) menganggap tidak perlu, dengan alasan bahwa input santri yang belajar di pesantren industri adalah mayoritas belum punya *basic* yang cukup terkait dengan ilmu alat (nahwu dan sharaf). Dengan demikian, akan menyulitkan para santri dalam memahami teks-teks yang berbahasa Arab.

Adapun mengenai alokasi waktu dan kapan seharusnya materi tersebut diajarkan, diketahui bahwa mayoritas responden menghendaki diajarkan malam hari, yakni 177 orang (88,5%). Sedangkan yang menghendaki pagi dan siang, sebanyak 23 orang (11,5%) saja. Selanjutnya tentang jumlah jam, rata-rata mereka menjawab dua jam saja cukup untuk keseluruhan materi pelajaran dalam setiap pertemuan, yakni sebanyak 121 orang (61%). Sedangkan yang menghendaki jangka waktu tiga jam sebanyak 23 orang (11%), dan yang menghendaki 4 jam sebanyak 56 (28%).

Dengan demikian bisa dipahami bahwa masalah kehidupan buruh pabrik dengan segala suka dan dukanya adalah persoalan kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sudah sedemikian rupa kecenderungannya mengiringi era industrialisasi. Kesadaran itu kemudian diwujudkan dengan menawarkan formulasi pemecahan secara riil masalah yang berdimensi psikologis, ekonomis,

sosiologis, dan religius yang diwujudkan melalui pendekatan edukatif-religius yang diwujudkan melalui aktivitas pembinaan, moral-keagamaan yang terindikasikan dalam sebuah lembaga pesantren. Pesantren ini memosisikan diri sebagai jembatan penghubung antara kepentingan buruh sebagai pekerja dan sebagai santri dengan tidak menimbulkan persoalan baru di kalangan yang lebih luas (baca: dunia industri). Hal itu dibuktikan dengan tampilannya yang fleksibel disesuaikan dengan kesempatan, tenaga, dan kebutuhan santri dalam pengertian seluas-luasnya.

## 6. Metode Pembelajaran

Semua jenis materi yang tercakup dalam kurikulum pesantren industri ini hendaknya disampaikan dengan menarik, dalam arti tidak monoton sebagaimana yang terjadi di pesantren konvensional, di mana seorang kiai atau ustadz sangat aktif dan sepihak, sementara para santrinya sangat pasif dan hanya melakukan kegiatan mencatat dan merekam apa yang sedang diucapkan kiaiinya secara terus-menerus dari hari ke hari.

Dalam kaitannya dengan metode pembelajaran di pesantren industri ini, didapatkan data bahwa dari 200 responden 191 orang (95,5%) menghendaki adanya perubahan metode mengajar, dalam arti tidak sama dengan pesantren konvensional. Konkretnya, para santri diupayakan turut aktif dalam proses belajar mengajar. Setelah kiai atau ustadz selesai menjelaskan satu persoalan, dibuka dialog interaktif dengan para santri tentang beberapa kasus yang dialami oleh mereka, selanjutnya kiai atau ustadz tersebut menjelaskannya sesuai kajian saat itu atau mengembangkannya dengan kajian kitab-kitab lain dan seterusnya. Yang demikian itu, seperti penuturan seorang buruh yang bernama Emil Hamdani:

“Sebagai karyawan buruh, kami akui selalu mempunyai masalah-masalah yang sering tidak mampu kami pecahkan sendiri, baik menyangkut persoalan pribadi maupun persoalan lain yang terjadi di

pabrik, dan dengan mengikuti pengajian itu kami mengharapkan bisa membantu memecahkan masalah-masalah tadi. Jika memungkinkan untuk kami sampaikan di forum pengajian dengan bapak kiai maka akan kami sampaikan, jika tidak, maka akan kami konsultasikan secara khusus dengan beliau.”<sup>4</sup>

## 7. Penegakan Aturan

Selanjutnya tentang penegakan aturan, hendaknya pesantren industri ini secara mendasar melakukan klasifikasi sesuai dengan jenis aturannya. Terhadap aturan-aturan yang berkaitan dengan jam belajar dan atau pelaksanaan kegiatan-kegiatan rutin, pesantren jenis ini melakukan penegakan secara fleksibel dan tidak seketat sebagaimana di pesantren “konvensional”. Namun demikian, terhadap aturan yang berkaitan dengan moralitas dan atau kewajiban keagamaan secara individual, pesantren jenis ini tetap melakukan penegakan secara ketat. Persoalan moralitas tersebut di antaranya berkaitan dengan praktik-praktik *mo limo*: maling (mencuri), *madon* (melacur), minum (minum-minuman keras), *madat* (candu), dan main (judi). Adapun terkait dengan hukuman apa yang seharusnya diberikan, mayoritas, yakni 179 orang (89,5%) menghendaki hukuman yang bersifat mendidik dan hanya 21 orang saja (10,5%) yang menghendaki hukuman fisik, jika pelanggaran yang dilakukannya tersebut masuk kategori ringan, seperti tidak aktif mengikuti pelajaran, tidak shalat berjama’ah dan sebagainya. Akan tetapi, jika pelanggaran yang dilakukan itu berhubungan dengan moralitas dengan melakukan *molimo*, seluruhnya menghendaki dikeluarkan dari pesantren.

## 8. Sistem Keamanan

Sistem keamanan merupakan salah satu elemen paling penting dalam kaitannya dengan kehadiran pesantren buruh pabrik

---

<sup>4</sup> Wawancara tanggal 3 Mei 2002

ini, sebab ketenangan dan kenyamanan tidak mungkin bisa diperoleh melainkan terwujudnya sistem keamanan yang mapan dan terjamin. Ketika 200 orang buruh ditanya tentang sistem keamanan yang memadai di pesantren industri ini, 147 orang (73,5%) menjawab hendaknya dilakukan oleh pihak pesantren sendiri yang melibatkan santri. Sedang lainnya, yakni 53 orang (26,5%) menginginkan dikelola secara profesional dengan mengangkat dan menggaji satpam. Keinginan mayoritas ini bisa dipahami sendiri dengan alasan; para santri merasa bahwa pesantren adalah rumahnya sendiri dan bisa menekan biaya bulanan. Mustahil kiranya keamanan itu akan terwujud, sementara santri sendiri melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Dalam hal ini, seorang karyawan buruh bernama Eko Susanto mengatakan:

“Kami lebih senang dilibatkan sebagai penjaga malam secara bergiliran dengan teman-teman lainnya, daripada menyerahkan kepada orang lain (baca: satpam). Karena menurut kami, dengan menggaji satpam itu biayanya pasti diambilkan dari *syahriyyah* (uang bulanan) dan secara otomatis biaya yang harus kami keluarkan pun bertambah. Selama kami mampu lebih baik dilakukan sendiri.”<sup>5</sup>

## B. Sikap dan Pandangan Pengelola Areal Industri

### 1. PT. SIER (Surabaya Industri Estate Rungkut)

PT. SIER berdiri sejak 1974 dan mulai efektif pada 1977 dengan mengelola kawasan industri di daerah Rungkut. Saat ini membawahi sekitar 350 perusahaan dengan jumlah karyawan sekitar 100.000 orang. PT. SIER telah menyediakan fasilitas umum, di antaranya masjid, lapangan olah raga, dan sebagainya. Berkaitan dengan masalah pembinaan buruh pabrik, menurut Agung Prasetyo (Kabag Umum), PT. SIER tidak terlibat secara

---

<sup>5</sup> Wawancara tanggal 3 Mei 2002



langsung. Meski demikian, dengan tersedianya fasilitas umum, khususnya masjid, diharapkan dapat membantu meningkatkan pembinaan mental spiritual buruh pabrik yang ada di sekitarnya melalui beberapa kegiatan, antara lain PHBI (peringatan hari besar Islam), pengajian rutin, pendalaman baca tulis al-Qur'an, dan sebagainya. Pengelolaan masjid dan segala aktivitas keagamaan tersebut selanjutnya diserahkan pada masyarakat sekitar, dengan tetap mengajak PT. SIER untuk terlibat langsung dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan.

Selanjutnya, pendapat PT. SIER tentang rencana pendirian pesantren industri ini, ternyata sangat setuju, tetapi dalam pengelolaannya tidak hanya melibatkan PT. SIER semata, juga pabrik-pabrik yang ada di sekitarnya serta pemerintah daerah.

## **2. Ngoro Industri Persada (NIP)**

NIP merupakan perusahaan swasta murni yang dikelola Darmala, berdiri sejak tahun 1991. NIP mengelola 60 perusahaan di wilayah industri Ngoro, Mojosari, Mojokerto yang melibatkan kurang lebih 3.600 karyawan. Dari jumlah karyawan tersebut menurut kebijakan perusahaan, 40% di antara mereka diambilkan dari penduduk sekitar. Kebijakan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan tokoh-tokoh masyarakat di sekitar perusahaan dan pemerintah setempat. Meski demikian, proses rekrutmen karyawan tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan sumber daya dan profesionalitas. Hanya saja, karyawan yang diambil dari wilayah sekitar tetap memperoleh prioritas dari perusahaan.

Terkait dengan hadirnya pesantren buruh pabrik ini, Bapak Soerojo (Kepala Bagian Personalia) mengatakan bahwa pembinaan keagamaan perusahaan merupakan hal yang sangat penting. Khusus pembinaan keagamaan di NIP, dipusatkan di masjid "al-Mubarak", masjid yang disediakan perusahaan. Pembinaan keagamaan diwujudkan dalam bentuk pemberian fasilitas untuk

pengajian dalam rangka PHBI dan khatib Jum'at. Semua pembinaan keagamaan dilakukan pada waktu siang hari (11.30-13.00 WIB). Dalam wujud yang berbeda, pembinaan keagamaan NIP dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan kepada masjid-masjid yang ada di sekitar perusahaan serta pemberian bantuan finansial untuk pembiayaan kegiatan yang dilaksanakan di masjid-masjid tersebut. Dalam melaksanakan pembinaan keagamaan NIP dibantu berbagai pihak, di antaranya; MWC NU Mojosari, GP Ansor serta pihak Darmala sendiri. Dalam hal ini, pihak Darmala biasanya diposisikan sebagai bendahara. NIP setuju dengan keberadaan pesantren buruh pabrik, karena dianggap bernilai positif baik bagi pihak perusahaan sendiri, karyawan, dan masyarakat sekitarnya.

## C. Sikap dan Pandangan Kalangan Birokrat, Ormas Islam, dan Pakar Pendidikan

### 1. Kalangan Birokrat

Kalangan birokrat yang bisa dimintai keterangan terkait dengan permasalahan penelitian ini diwakili oleh Kasi pengurus Depag Wilayah Jawa Timur yang bernama Drs. Ahmad Suyuthi, Ms. Baginya, pesantren buruh pabrik ini merupakan kebutuhan yang sangat penting dan mendesak, mengingat visi dan misi yang diembannya begitu mulia, tampaknya keberadaan pesantren industri ini adalah suatu hal yang tidak boleh ditunda terlalu lama, dalam artian bisa diwujudkan dengan segera. Tentu, yang demikian itu perlu adanya kerja sama berbagai instansi yang terkait, misalnya Departemen Agama, Departemen Sosial, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Perumnas, pihak pengelola pabrik dan sebagainya. Menurutnya, jika semua instansi yang terkait tersebut saling bahu-membahu dan punya kesamaan visi dalam rangka membangun Sumber Daya Manusia (SDM) bangsa ini, khususnya bagi para karyawan buruh pabrik, maka gagasan

tentang pesantren industri ini tidak mustahil akan menjadi suatu kenyataan.

Menurutnya, saat ini sedang dikembangkan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang sarasannya adalah masyarakat luas yang tidak mampu dan tidak punya kesempatan memasuki pendidikan jalur formal (sekolah), termasuk sebagian peserta didiknya adalah para karyawan buruh pabrik dengan tujuan untuk memberantas buta huruf. Sistem pengajaran yang dikembangkan dalam PLS tersebut, menggunakan sistem kelompok belajar (kejar), yang terdiri dari kejar paket A, kejar paket B dan kejar paket C. Selanjutnya, bagi mereka yang telah menyelesaikan paket A1 sampai dengan A20, maka mereka dianggap setara dengan tamatan sekolah dasar (SD), begitu juga untuk paket B1 sampai dengan B20 mereka dianggap setara dengan lulusan SLTP dan bagi mereka yang telah menyelesaikan paket C1 sampai dengan C20, sama dengan SLTA.

Sebenarnya, sistem belajar melalui kejar paket A, B, dan C tersebut sangat bagus, hanya menurutnya, masih terdapat kekurangan dan ini justru merupakan persoalan yang sangat urgen bagi masa depan peserta didik itu sendiri, yakni tidak diajarkan materi agama dalam sistem kejar tersebut. Dengan demikian, ada sesuatu yang terabaikan dalam penyusunan materi pengajarannya. Bertitik tolak pada kenyataan di atas, maka kehadiran pesantren buruh pabrik ini menjadi sebuah solusi alternatif yang bagus. Dalam arti, di satu sisi turut mensukseskan program pemberantasan buta huruf melalui materi pengajaran umum, di sisi lain memberikan materi agama untuk bekal bagi kehidupan di akhirat kelak. Selain itu, mengingat umumnya para buruh berpendidikan rendah dan tidak mempunyai keterampilan yang memadai, maka dalam pesantren industri itu nanti sebaiknya diajarkan keterampilan sesuai dengan bakat dan kemampuan santri buruh.

Mengenai materi agama yang diajarkan, sebaiknya jangan terlalu tinggi, yang terpenting adalah bagaimana mereka secepatnya bisa membaca dan menulis al-Qur'an dengan baik, bisa melakukan shalat dengan sempurna lengkap dengan bacaannya, bagaimana mereka bisa mengerti tentang cara mengeluarkan zakat dan sebagainya. Jadi, hendaknya kurikulum yang diberikan di pesantren industri ini mengarah pada amaliah-amaliah praktis dan mudah dilaksanakan.

Terkait dengan alokasi waktu belajar, aturan yang ditegakkan seharusnya disesuaikan dengan jam kerja para buruh itu sendiri, dan aturan yang dibuat jangan ketat dan membebani mereka. Kalau di antara mereka ada yang melanggar, hukuman yang diberikan tidak bersifat fisik, tapi lebih mengedepankan asas edukatif. Semua ini adalah demi keberhasilan program yang telah disusun di pesantren industri tersebut. Lebih jauh dari ini semua, sebaiknya dalam penyusunan kurikulum para santri ikut dilibatkan, agar mereka lebih termotivasi untuk lebih giat belajar sesuai dengan pilhan yang telah disepakati. Begitu pula dalam pembuatan segala peraturan dan penyusunan jadwal belajar, akan lebih efektif, manakala mereka juga disertakan.

Berdasarkan sistem belajar yang dikembangkan melalui PLS dengan kejar paket tersebut, maka strategi belajar yang cocok untuk diterapkan di pesantren industri ini adalah dengan sistem modul (pola belajar mandiri). Artinya, para santri sudah mempunyai buku-buku paket yang bisa dipelajari kapan saja dan di mana saja sehingga mereka tidak selalu menggantungkan sepenuhnya dengan guru atau pembina. Pertemuan dengan guru tersebut, disesuaikan dan disepakati bersama menurut kebutuhan.

Adapun mengenai kebutuhan biaya atau ongkos yang harus ditanggung oleh santri, sebaiknya tidak terlalu memberatkan mereka (tidak mahal). Karena, misi pesantren industri ini, selain memberikan pembinaan mental spiritual, juga untuk mening-

katkan taraf hidup mereka. Oleh karena itu, untuk mewujudkan gagasan ini, di samping memberikan pembinaan mental spiritual, juga meningkatkan taraf hidup mereka. Oleh karena itu, untuk mewujudkan gagasan ini sudah menjadi keharusan adanya kerja sama antara berbagai instansi terkait, baik instansi pemerintah maupun swasta.

## 2. Ormas Islam (Muhammadiyah dan NU)

Tokoh Muhammadiyah yang dimintai pandangan mengenai pesantren buruh pabrik adalah Drs. H. Najib Hamid, sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Ia aktif berdakwah di berbagai kota di Jawa Timur, pernah nyantri di Pondok Modern Muhammadiyah Paciran Lamongan dan Pondok Pesantren Manarul 'Ilmi yang diasuh oleh KH. Mu'ammal Hamidy, Lc. Sebagai orang yang lama belajar dan hidup di pesantren, ia mengetahui betul dunia pesantren dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Berkaitan dengan kemungkinan (keberadaan) pesantren buruh pabrik, ia memberikan beberapa pandangan dan harapan.

Bagi Bapak Najib Hamid, pesantren buruh pabrik dapat dianggap sebagai fenomena baru. Sebab, selama ini masyarakat hanya mengenal pesantren konvensional dan pesantren modern. Menurutnya, pesantren konvensional adalah pesantren yang menitikberatkan pada ajaran ilmu-ilmu agama yang bersumberkan kitab-kitab klasik (kitab kuning), sementara pesantren modern di samping mengajarkan ilmu-ilmu agama juga mengajarkan ilmu-ilmu rasional, olah raga, dan ketrampilan lainnya. Nah, berkaitan dengan pesantren buruh pabrik, pesantren yang santri/santri-watinya berprofesi sebagai buruh pabrik/pekerja, Bapak Najib Hamid menganggap sebagai hal yang baru. Meski relatif baru, namun demikian keberadaannya harus tetap didukung. Dukungan tersebut dianggap penting mengingat, selama ini masih banyak komunitas umat Islam belum tersentuh dakwah Islam. Dalam

kaitan dengan ini, buruh pabrik/pekerja industri dapat dianggap sebagai salah satu sasaran dakwah yang belum banyak digarap. Apalagi, selama ini ada anggapan bahwa perusahaan belum memberikan fasilitas bimbingan mental agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang melanggar norma masyarakat, dan ajaran agama. Belum lagi, mereka kebanyakan merupakan orang urban dengan ragam latar belakang dan pendidikan rendah. Mereka jelas mengalami kekagetan ketika bersentuhan dengan budaya metropolis.

Untuk tahap awal model pesantren buruh pabrik tidak jauh berbeda dengan pesantren pada umumnya, misalnya dipimpin oleh seorang pengasuh (kiai), dibina oleh guru-guru, dilengkapi sarana ibadah (masjid/mushalla), tempat belajar, MCK, kantin, dan tempat olah raga. Hal yang penting diperhatikan adalah jenis pelajaran yang diajarkan. Menurut Najib Hamid, materi yang diajarkan di pesantren ini haruslah pelajaran dasar agama, seperti tauhid, cara beribadah, mengaji al-Qur'an, dan akhlak. Hal ini penting, mengingat pesantren berhadapan dengan jenis santri yang tidak hanya belajar, melainkan juga bekerja. Bahkan bisa jadi, pilihan tinggal di pesantren itu didasarkan pada pertimbangan ekonomis (hidup hemat). Maka pesantren juga harus mempertimbangkan alasan ini. Artinya, sebisa mungkin biaya hidup di pesantren juga harus murah; tidak lebih mahal dari kos-kosan.

Ketika ditanya mengenai model ideal pesantren buruh pabrik, Najib Hamid mengatakan bahwa hal itu bersifat pengembangan. Misalnya, pilihan lokasi pesantren yang harus dekat dengan tempat kerja, mengadakan kerja sama dengan pihak perusahaan dan pemerintah, penambahan pelajaran-pelajaran yang sifatnya menunjang keahlian santri/santriwati di dunia kerja, serta penambahan sarana dan prasarana. Kerja sama dengan pihak perusahaan merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh pihak pesantren. Sebab, bisa jadi perusahaan memberikan fasilitas yang memadai terhadap pesantren.

Menurutnya, kurikulum pelajaran pesantren buruh pabrik ada dua: agama dan keterampilan. Pelajaran-pelajaran agama tetap menjadi kurikulum pokok, sebab namanya juga pesantren, maka harus mengajarkan ilmu-ilmu agama. Kitab-kitab yang diajarkan harus yang sederhana dan mudah dicerna oleh buruh pabrik. Jenis kitab yang diajarkan adalah tauhid, ibadah, dan akhlak. Sedangkan pelajaran keterampilan sifatnya hanya penunjang, dan ini sangat terkait dengan kebutuhan santri /santriwati. Di sinilah pengasuh/pimpinan pesantren harus berembung dengan santri/santriwati mengenai pilihan pelajaran keterampilan, misalnya, mengetik, komputer, menjahit, memasak, mesin, permebelan, dan lain-lain.

Mengenai metode pembelajaran, menurutnya, harus disesuaikan dengan keadaan santri/santriwati. Misalnya, menggunakan metode pembelajaran orang dewasa dengan memberikan banyak kesempatan kepada mereka untuk aktif, dengan menggunakan bahasa pengantar yang mudah dicerna, dan untuk pelajaran ketrampilan tentu saja harus lebih banyak menekankan pada praktik. Mengenai waktu belajar, harus disesuaikan dengan kesempatan santri/santriwati. Dalam hal ini pengasuh/pimpinan pesantren harus memperhatikan waktu kerja (*shift*) buruh pabrik. Artinya, bagi mereka yang kerja pagi, maka waktu belajarnya adalah malam, sementara mereka yang kerja malam, waktu kerjanya adalah pagi hari.

Selanjutnya, tokoh NU yang dimintai pendapatnya tentang pesantren ini adalah Bapak KH. Moch. Imam Chambali (Pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa "Al-Jihad" Surabaya). Di samping sebagai pengasuh pondok pesantren, ia juga seorang mubaligh kondang di wilayah Jawa Timur, khususnya Surabaya. Ia juga membina berbagai majelis taklim, mulai dari masyarakat biasa hingga kalangan perkantoran (birokrat) di Surabaya.

Bapak Imam Chambali menyambut baik, bahkan akan turut membantu (terlibat langsung) dalam pembinaan keagamaan jika diperlukan. Dalam hal ini, ia menyarankan dibentuknya kelompok *istighasah* bagi karyawan buruh, dan diisi dengan ceramah agama sebelum *istighasah* dimulai. Ini dimaksudkan untuk membina mental spiritual mereka. Karena tanpa pendekatan semacam dzikir bersama dan semacamnya, rasanya sulit menggapai ketenangan batin sebagaimana diharapkan oleh setiap orang.

Sebagaimana pendapat Najib di atas, Imam Chambali juga setuju kalau pesantren ini dipimpin oleh seorang kiai yang dibantu oleh dewan guru. Dalam arti, seorang tokoh kiai yang tidak terlibat dalam politik praktis dan bisnis untuk sepenuhnya berkonsentrasi pada pembinaan spiritual buruh. Sebab, jika kiai yang ditokohkan terlibat dalam kegiatan politik dan bisnis, maka akan mempengaruhi keikhlasannya dan mengurangi kewibawaannya. Dengan kata lain, ia harus mampu menjadi tokoh spiritual di kalangan buruh dengan mengedepankan prinsip ikhlas dan tawakkal.

Mengenai materi yang diajarkan, meliputi kajian hukum Islam (*fiqh*), pembinaan akhlak dan ketauhidan. Jika memungkinkan bisa ditambah keterampilan yang bermanfaat bagi masa depan para karyawan itu sendiri, seperti menjahit, kursus potong rambut, tata rias pengantin, dan sebagainya. Semua jenis materi yang diajarkan tersebut, sebaiknya disesuaikan dengan situasi dan kondisi buruh itu sendiri, yakni diatur sedemikian rupa agar tidak berbenturan dengan waktu kerja di pabrik.

### 3. Pakar Pendidikan

Pakar pendidikan yang dimintai keterangan tentang pesantren ini adalah Arief Furqon, Direktur Binperta Islam Depag RI, mantan Pembantu Rektor I IAIN Sunan Ampel Surabaya. Menurutnya, pesantren buruh merupakan lembaga pendidikan Islam sejenis pesantren yang bertujuan memberikan bimbingan keagamaan



kepada buruh yang terletak di kawasan industri. Jadi, ia menggabungkan unsur-unsur pesantren tradisional dengan nilai-nilai industri.

Adapun terkait dengan model pembinaan buruh pabrik yang efektif, haruslah mampu menjembatani atau mengakomodasi dua realitas yang berbeda: realitas keagamaan dan realitas industri. Karena itu, kehadiran pesantren ini harus bersifat komprehensif, tidak saja menyangkut persoalan-persoalan keagamaan atau ilmu ukhrawi, tetapi juga mengakomodasi perkembangan mutakhir dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Konsekuensinya, kurikulum yang diajarkannya harus bersifat komprehensif, meliputi dua sisi keilmuan yang selama ini dianggap dualistik, yakni ilmu agama dan ilmu umum, bila perlu ditambah dengan keterampilan. Dalam menunjang keberhasilan proses pendidikan di pesantren buruh ini, kegiatan yang harus ditonjolkan adalah bukan saja kegiatan yang berorientasi pada latihan ritual-spiritual semata, melainkan juga kegiatan yang bertujuan meningkatkan etos kerja dan keterampilan santri buruh.

Tidak seperti pesantren tradisional pada umumnya yang mengandalkan pendekatan *sorogan* dan *wetonan*, metode pembelajaran dalam pesantren buruh pabrik ini bersifat dialogis dengan cara membuka kesempatan tanya-jawab seluas-luasnya kepada santri buruh. Hal ini disebabkan santri buruh lebih banyak didominasi oleh santri dewasa, bahkan sudah berumah tangga. Sebagai sebuah pesantren yang berusaha menggabungkan ilmu umum dengan ilmu agama, maka harus dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana yang mendukung penggabungan itu. Misalnya, ruang praktik (*workshop*), pelayanan teknologi dan informasi seperti internet, pelayanan kesehatan yang memadai, laboratorium bahasa, dan sebagainya.